# **SKRIPSI**

# KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK PEMBANGUNAN I SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Di Kotamadya Yogyakarta

(Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999)





FRANSISKA HANA MARTINA

NIM : 95 2114 112

NIRM: 950091121303120149

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2001

#### **SKRIPSI**

# Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Pembangunan I

# Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah

# Di Kotamadya Yogyakarta

Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999

# Oleh:

# FRANSISKA HANA MARTINA

NIM: 95 2114 112

950091121303120149

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal:

1 Oktober 2001

Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

Pembimbing II

Tanggal:

2 oktober 2001

Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt

# Skripsi

# Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Pembangunan I Sebagai Salah Satu Sumber

# Pendapatan Asli Daerah Di Kotamadya Yogyakarta

Tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Fransiska Hana Martina

NIM: 952114112

950091121303120149

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 15 Mei 2001

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

0 1

Dra.Fr. Ninik Yudianti, M.Acc

Sekretaris

Ketua

Drs. E. Sumardjono, M.B.A.

Anggota

Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

Anggota

Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt

Anggota

Drs. H. Herry Maridjo, M.Si.

Yogyakarta, 26 Mei 2001

Tanda Tangan

Fakultas Ekonomi

iversitas Sanata Dharma

Hg.Suseno TW.,M.S.

# PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta 1 juni 2001

Penulis

Fransiska Hana Martina

#### ABSTRAK

# KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK PEMBANGUNAN I SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

Fransiska Hana Martina Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2001

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Pembangunan I (PP I) terhadap penerimaan daerah dan tingkat pertumbuhan PP I di Kotamadya Yogyakarta

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan objek penelitian penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan antara penerimaan pendapatan PP I dengan penerimaan daerah.

Kontribusi pajak pembangunan I terbesar diperoleh dari sektor hotel dan rumah penginapan sebesar 44,1 prosen pada tahun anggaran 1995/1996. Kontribusi terkecil terdapat pada sektor sekaten pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 0,01 prosen. Tingkat pertumbuhan pajak pembangunan I terbesar diperoleh dari sektor katering pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar 484 prosen. Tingkat pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 dari sektor katering sebesar –84,25 prosen karena penerimaan pendapatannya lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

#### ABSTRACT

# THE CONTRIBUTION AND THE GROWTH OF THE DISTRICT TAX AS ONE OF THE REGIONAL OWNED REVENUE IN KOTAMADYA YOGYAKARTA

Fransiska Hana Martina Sanata Dharma University Yogyakarta 2001

This research intended to know part of the district tax (PP I) to the regional owned revenue and the growth level of the tax in Kotamadya Yogyakarta.

The research was a case study. The object of the research was the owned revenue in the budgeting year of 1995/1996 to 1998/1999. The data gathering techniques used were by interview and documentation. The data analysis technique was Horizontal Analysis; an analysis conducted by comparing the income of the first developmental tax to the regional revenue.

The largest part contribution of the district tax was obtained from hotels and motels sectors; it was for about 44.1% in the budgeting year of 1995/1996. The smallest part contribution was in "Sekaten" sector in the budgeting year of 1998/1999, that was 0.01%. The largest part of the growth level of the district tax was from catering sector in 1997/1998 for about 484%. The smallest part was in 1998/1999 from catering sector in 1998/1999for about 84.25% because the income was less than before.

# Kata Pengantar

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkatnya sehingga skripsi yang berjudul "Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Pembangunan I sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah" ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Kasih yang memberikan kehidupan
- Drs. Hg.Suseno TW.,M.S. Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan terutama dalam membaca, mengoreksi, mengarahkan serta mendukung penyusunan skripsi ini.
- 3. Drs. Joko Siswanto, MM.,Akt. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan terutama dalam membaca, mengoreksi, mengarahkan, serta mendukung penyusunan skripsi ini.
- 4. Dra. YFG. Agustinawansari,MM,Akt. yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis.

- 5. Drs. YP. Supardiyono, M.Si. yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis
- 6. M. Trisnawati Rahayu,SE,Akt. Yang telah banyak memberi bantuan dan pengarahan kepada penulis.
- Kepala dan karyawan PPO Dinas Pendapatan Daerah yang telah memberikan segala data yang diperlukan dengan sabar.
- 8. Bp. B. Hendra Puranto, SE yang telah memberikan referensi dalam penyusunan skripsi ini.
- 9. Seluruh dosen dan staff karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Bapak dan ibu yang telah membiayai kuliah dan memberikan dorongan, dukungan dan doa.
- Adik-adikku, Willy, Vinsen, dan Utik serta Lik Yadi atas segala dukungannya dan bantuannya.
- 12. Sahabatku Hesti dan Siska yang telah memberikan dorongan dan dukungan serta doanya

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun akan menerima segala kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan.

Yogyakarta

Penyusun



# DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PERSETUJUAN	ii
HALAM	AN PENGESAHAN	iii
PERNYA	ATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRA	AK	v
ABSTRA	ACT	vi
KATA P	ENGANTAR	vii
DAFTAF	R ISI	ix
DAFTA	R TABEL	xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	3
	C. Rumusan Masalah	4
	D. Tujuan Penelitian	4
	E. Manfaat Penelitian	4
	F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	6
	A. Pengertian Pajak	6
	B. Fungsi Pajak	7
	C. Syarat Pemungutan Pajak	8
	D. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	9

	E. Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak Materiil	10
	F. Pengelompokan Pajak	11
	G. Tata Cara Pemungutan Pajak	12
	H. Tarif Pajak	14
	I. Manfaat Pajak	15
	J. Sumber-sumber Pendapatan Pajak	15
	K. Pajak Pembangunan I	17
	L. Jumlah Pajak	23
	M. Sanksi	23
	N. Penyetoran	24
	O. Pembebasan	25
BAB III	METODE PENELITIAN	26
	A.Jenis Penelitian	26
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
	C. Subjek dan Objek Penelitian	26
	D. Metode Pengumpulan Data	27
	E. Data Yang Dicari	27
	F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV	GAMBARAN UMUM	29
	A. Sejarah singkat berdirinya Kota Yogyakarta	29
	B. Geografi	31
	C. Batas Wilayah	34

	D. Kondisi geografis	34
	E. Pembagian Wilayah	36
	F. Kekayaan Alam	39
	G. Nilai-nilai Budaya	41
	H. Ekonomi	42
BAB V	ANALISIS DATA	
	A. Penjelasan Data	45
	B. Kontribusi PP I	47
	C. Tingkat Pertumbuhan PP I	61
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
DAFTAI	R PUSTAKA	
KUISIO	NER	
DAFTA	R RIWAYAT HIDUP	

# DAFTAR TABEL

IV.1	Jumlah penduduk kota Yogyakarta	31
IV.2	Kepadatan penduduk menurut kecamatan	33
IV.3	Pembagian wilayah menurut kecamatan, kelurahan, luas	36
V.4	Jumlah hotel menurut kecamatan	44
V.5	Jumlah PP I hotel dan rumah penginapan serta penerimaan	
	Daerah	45
V.6	Hasil perhitungan kontribusi PP I dari hotel dan rumah	
	Penginapan	48
V.7	Jumlah PP I dari sektor rumah makan	49
V.8	Hasil perhitungan kontribusi PP I rumah makan	51
V.9	Jumlah PP I dari sektor katering	52
V.10	Hasil perhitungan kontribusi PP I dari katering	54
V.11	Jumlah PP I dari pedagang kaki lima	54
V.12	Hasil perhitungan kontribusi PP I dari pedagang kaki lima	56
V.13	Penerimaan pajak daerah dan PP I sekaten	57
V.14	Hasil perhitungan kontribusi sekaten	59
V.15	Hasil perhitungan kontribusi PP I	60
V.16	Penerimaan daerah dari rumah makan, katering,	
	pedagang kaki lima dan sekaten	63
V.17	Hasil perhitungan tingkat pertumbuhan PP I	69

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional menurut GBHN adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara sederhana tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup rakyat (GBHN:9). Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan investasi dalam jumlah yang besar yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri. Disamping itu diperlukan usaha yang sungguhsungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari *eksport*, sehingga akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan nasional.

Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian antara keuangan negara dengan keuangan daerah juga terdapat hubungan yang sangat erat yang juga mencakup pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Pendapatan pemerintah menjadi perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat merasa perlu memperbesar jumlah pendapatannya sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan menurunnya penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari minyak bumi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menaruh perhatian yang besar terhadap pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi pusat.

Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, serasi, serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun antara lain dengan meningkatkan dana secara wajar dan tertib termasuk penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Mengantisipasi masalah keuangan yang diperlukan secara rutin dan pembangunan maka disusunlah APBD yaitu anggaran yang berimbang dan dinamis. Dengan prinsip itu, peranan APBD dalam pembangunan untuk urusan penyelenggaraan pemerintah terus ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan keuangan daerah, salah satu caranya adalah dengan melalui pemungutan pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum pemungutan pajak pasal 23 (2) UUD 1945 "Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan UU". Penerimaan daerah pada APBD tingkat II terdiri dari :

- 1. Pendapatan asli daerah (PAD)
- 2. Sumbangan dan bantuan serta pinjaman daerah

Untuk memperbesar penerimaan di sektor pajak maka pajak pembangunan I perlu ditingkatkan untuk menambah kemampuan pembiayaan dari Dati II baik untuk keperluan rutin maupun pembangunan agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dapat dikurangi. Pajak pembangunan I mempunyai prioritas untuk

berkembang disamping pajak-pajak lain. Objek pajak yang dikerahkan pada pajak pembangunan I antara lain : Hotel dan Restoran.

#### B. Batasan Masalah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diharapkan oleh Pemda untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah terdiri dari berbagai macam pajak, seperti: pajak reklame, pajak hiburan, Pajak Pembangunan I, pajak penerangan jalan. Salah satu bagian dari pajak tersebut adalah pajak daerah yang diatur dan dikelola oleh Pemda kota Yogyakarta. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa peranan pajak daerah khususnya pajak pembangunan I cukup penting dalam arti merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial.

Berbagai upaya dilaksanakan Pemda dalam mengupayakan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pajak pembangunan I. Usaha peningkatan pajak pembangunan I tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak itu sendiri, pelayanan oleh petugas serta didukung oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan daerah yang berlaku.

PAD di propinsi DIY masih sangat kecil. Untuk mengetahuinya maka diketahui dengan kontribusi dan tingkat pertumbuhan Pajak Pembangunan I. Penulis membatasi dengan masalah pada pajak pembangunan I.

#### C. Rumusan Masalah

1. Berapa besar kontribusi pajak pembangunan I terhadap penerimaan daerah?

 Bagaimana tingkat pertumbuhan Pajak Pembangunan I dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 ?

# D. Tujuan Penelitian

- Mengetahui besarnya kontribusi pajak pembangunan I terhadap penerimaan daerah.
- 2. Mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Pembangunan I.

#### E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

# 1. Bagi Penulis

Mendapatkan pengalaman lapangan dalam menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam studi dengan kenyataan dalam lingkungan masyarakat yang sebenarnya.

#### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini akan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk yang akan datang dalam mengambil langkah kebijaksanaan mengenai upaya peningkatan pajak daerah.

# 3. Bagi Universitas

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya dan menambah referensi perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori ini akan digunakan sebagai landasan dalam pembahasan masalah yang akan diteliti.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum

Bab ini menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kota Yogyakarta, meliputi : sejarah kota Yogyakarta, kondisi geografis , pembagian wilayah, kekayaan alam,nilai-nilai budaya Kota Yogyakarta.

Bab V : Analisis data dan pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data dan pembahasan data.

Bab VI: Kesimpulan dan saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

#### ВАВ П

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan (Zandjani,1972:1).

Pungutan atau pajak merupakan penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pemungutan atau pajak adalah antara pemerintah dengan warga negara. Jadi dalam hubungan yang bersifat hokum publik, oleh karena itu harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Harus ditetapkan dengan undang-undang
- b. Interen dengan sifat undang-undang dan peraturan yang diturunkan pungutan itu dapat dilaksanakan
- c. Interen dengan sifat undang-undang dan peraturan harus mempunyai kepastian hukum (Soetrisno ,1982:109).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo ,1999:1).

Unsur-unsur dari definisi pajak tersebut adalah :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Negara berhak memungut pajak. Iuran tersebut bukan berupa barang tetapi uang.

b. Berdasarkan undang-undang dan peraturan

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Dapat dipaksakan

Dapat dipaksakan berarti apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan yaitu dengan surat paksa.

- d. Tanpa jasa timbal balik (kontra prestasi) atau tidak ada timbal balik secara langsung
- e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik invesment*.(Samudra,1974:8)

# B. Fungsi pajak

Ada 2 fungsi pajak adalah:

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran.

# b. Fungsi regulerend

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijaksanaan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan banyak digunakan untuk sektor swasta (Mardiasmo 1999:2).

#### C. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
  Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi warganya maupun bagi negaranya.
- c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

# d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

# e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

# D. Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori ini antara lain (Mardiasmo 1999:3):

#### 1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda,dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

#### 2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masingmasing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

#### 3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

## 4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### 5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya pemungutan pajak berarti menatik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk tumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat akan diutamakan.

#### E. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak (Mardiasmo 1999:5).

Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

# 1. Hukum pajak materiil

Menurut norma-norma yang menerangkan antara lain : keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak(objek pajak), subjek pajak, tarif pajak,

segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

# 2. Hukum pajak formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak

# F Pengelompokan Pajak

# 1. Menurut golongannya

- Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebanan atau dilimpahkan pada orang lain
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

#### 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

# 3. Menurut lembaga pemungutannya

- Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kotamadya/kabupaten).

# G.Tata Cara Pemungutan Pajak

# 1. Stelse pajak

Pada umumnya stelse pajak yang dipakai adalah:

a. Riel stelsel (stelsel yang nyata)

Stelsel ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun.

b. Fictive stelsel (stelsel anggapan)

Suatu stelsel yang di dalam pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung pada bunyi UU yang bersangkutan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel riel dan stelsel anggapan, dalam stelsel campuran mula-mula pajak ditentukan berdasarkan anggapan, kemudian setelah akhir tahun dikoreksi dengan stelsel riel.

# 2. Asas pemungutan pajak

# a. Asas domisili (tempat tinggal)

Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung dari tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara.

#### b. Asas sumber

Cara pemungutan pajak tergantung/didasarkan pada adanya di suatu negara.

# c. Asas kebangsaan

Asas ini berdasarkan kebangsaan berhubungan dengan pengenaan pajak suatu negara.

# 3. Sistem pemungutan pajak

Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak-pajak yang berlaku yaitu:

# a. Official assessment system

Pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak ditentukan sendiri oleh fiskus atau aparatur perpajakan.

# b. Self assessment system

Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh inspeksi pajak dengan wajib pajak yang bersangkutan.

#### c. With holding system

Suatu cara pemungutan dimana perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

# H.Tarif Pajak

Tarif pajak yang berlaku dalam pemungutan pajak adalah:

# a. Tarif pajak proporsional

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, sudah barang tentu pajak yang di bayar akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan pajak.

## b. Tarif pajak menurun (degresif)

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasr pengenaan pajak. Walaupun prosentase pemungutannya semakin kecil namun tidak berarti bahwa pajak yang terutang juga kecil, bahkan akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak, tetapi kenaikkan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah yang dikenakan pajak.

#### c. Tarif pajak tetap

Tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah, sehingga besarnya pajak yang terutang tidak tergantung pada suatu jumlah (nilai objek) yang dikenakan pajak.

#### d. Tarif pajak progresif (meningkat)

Suatu tarif pemungutan pajak dengan prosentase pemungutan yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak.

# e. Tarif pajak regresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## I. Manfaat Pajak

Pajak bermanfaat sebagai sumber pendapatan negara. Menjalankan tugas rutin dalam pembangunan negara memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak. Pengeluaran rutin seperti belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya, biayanya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan pengeluaran pembangunan berasal dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah setiap tahun harus meningkat dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan non migas, dimana penerimaan non migas ini sebagian besar penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.

Pajak juga bermanfaat sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan dan juga sebagai pendorong investasi. Dana yang dipindahkan dari sector swasta ke sector pemerintah digunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan keamanan.

#### J. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1. Pengertian pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah meliputi tidak saja PAD, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan yang berasal dari pusat yang dalam realisasinya dapat

saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari atau daerah yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah tersebut. Sumber-sumber pendapatan daerah lainnya adalah dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan yang sah antara lain: hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD berbeda dengan pendapatan daerah (secara global) sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan PAD. Contoh dari PAD adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain, bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta PAD yan sah lainnya antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Persyaratan yang harus dipenuhi mengenai pajak daerah (Samudra A Azhari 1995:51)

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat
- b. Sederhana
- c. Jenisnya tidak terlalu banyak
- c. Lapangan pajaknya tidak melampaui/mencampuri pajak pusat
- d. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut
- e. Biaya administrasinya rendah
- f. Beban pajak relatif seimbang
- g. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional

# 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu hal yang sangat vital bagi daerah dan harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas. Pelaksanaan APBD harus terarah pada sasaran dengan cara yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu tahun anggaran daerah adalah sama dengan tahun anggaran negara (pusat), maka daerah baru dapat menyusun APBD sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterima. Realitas dalam proses penyusunan, pengesahan serta pengundangan APBD itu baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran, walaupun demikian persiapannya dapat dimulai sebelumnya.

# K. Pajak Pembangunan I (PP I)

Jenis pajak daerah terdiri dari (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000):

## a. Pajak hotel dan restoran (PP I)

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran.

Hotel atau penginapan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

Restoran atau rumah makan dan sejenisnya adalah tempat untuk menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut biaya, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. Tarif yang dipungut adalah 10% atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

#### b. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan/ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Tarif yang dikenakan adalah 35% atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

# c. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersiil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca,dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Tarif yang dikenakan adalah 25% atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.

#### d. Pajak Penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif yang dikenakan adalah 10% atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.

# e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: pasir, batu, dan sebagainya. Tarif yang dikenakan adalah 20% atas nilai jual nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

# f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga atau pertanian rakyat.

Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Oleh karena sumber daya air bawah tanah dan air permukaan dikelola berdasarkan atas wilayah yang biasanya meliputi beberapa daerah kabupaten dan kota, maka baik pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah pusat tetap berwenang mengatur koordinasi pengelolaannya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tarif yang dikenakan adalah 20% atas nilai perolehan air yang dimanfaatkan, antara lain, berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air.

Skripsi ini menganalisi Pajak Pembangunan I atau pajak Hotel dan Restoran maka yang diperjelas adalah Pajak Pembangunan I.

Dasar hukum yang melandasi berlakunya UU Pajak Pembangunan I adalah UU no. 14 tahun 1947 (Lembaga Negara Indonesia tahun 1947 nomor 25).

Tempat-tempat yang dikenai PP I adalah:

#### a. Hotel

Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Termasuk dalam pengertian hotel adalah seperti: gubug wisata (cottage), motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, pondok wisata, rumah makan atau restoran.

#### b. Catering Servis

Perkembangan peraturan pajak pembangunan I masih tertinggal dan belum menjangkau semua bidang usaha rumah makan dan rumah penginapan. Oleh karena itu lalu dikeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang perluasan sasaran. Pengertian rumah makan dalam peraturan ini diperluas

sehingga dengan demikian perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan makanan (catering servis) termasuk didalamnya. Penetapan pajak ditentukan untuk masa paling lama 3 bulan, mengingat bahwa objek pajak golongan ini pemiliknya tidak tetap, begitu juga tempat usahanya pun tidak tetap. Sehingga untuk memudahkan wajib pajak menyetor serta memudahkan penawasan dari pihak petugas, maka cara pemungutan pajak diatur dengan menggunakan materai bangunan yang dapat disetor/diangsur seminggu sekali. Pada umumnya rumah makan yang tidak tetap dan tidak menetap belum dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap untuk dapat dijadikan dasar penetapan pajak, di samping itu dengan tidak tetap atau tidak menetap menimbulkan kesulitan pula dalam penagihan pajak. Pemerintah memandang perlu untuk mengadakan pelayanan langsung penagihan pajak ditempat usaha wajib pajak.

#### Objek pajak pembangunan I meliputi:

- a. Pembayaran atas pembelian makanan atau minuman dan tambahannya di rumah makan atau restoran.
- Pembayaran atas persewaan kamar termasuk tambahannyadi hotel, rumah penginapan, motel dan losmen.
- Pembayaran atas penyewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel,
   rumah penginapan, motel atau losmen.

Pada dasarnya pajak pembangunan I menganut self assessment system. Sistem ini menganjurkan wajib pajak agar dapat menghitung pajak, memungut, menyetor,

melunasi dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari wajib pajak. Pemerintah mengharapkan agar semua wajib pajak dapat diarahkan supaya melaksanakan sistem ini dengan baik.

Dengan adanya sistem ini wajib pajak pembangunan I dapat dibagi atas tiga yaitu

- a. Wajib pajak setor tunai (contante storting)(Samudra A Azhari,1995:175)
   Ada beberapa hal yang menguntungkan bagi wajib pajak setor tunai:
  - Wajib pajak mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menghitung, memungut dan menyetor sendiri pajak terutang.
  - 2. Bila hal ini dilakukan dengan baik secara praktis telah menghilangkan ketegangan yang timbul antara fiskus dengan wajib pajak.
  - Menghadapi kontrol sosial wajib pajak setor tunai lebih aman dibandingkan dengan wajib pajak SKP karena wajib pajak setor tunai mempunyai keharusan dalam menggunakan bon yang telah dilegalisasi oleh dinas pendapatan daerah.
  - Sistem setor tunai wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan SPT susulan atau koreksi.
- Jumlah pajak yang harus dibayar selalu seimbang/proporsional yakni 10% dari omzet.
- b. Wajib pajak SKP ( surat ketetapan pajak)
   Pelaksanaan penyetoran pajak ole wajib pajak SKP harus menggunakan surat ketetapan pajak yang telah diterima atau disetor langsung ke kantor bendahara

kota (cabang). Jadwal waktunya sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak tersebut.

# c. Wajib pajak materai bangunan

Jumlah pajak yang harus dibayar ditaksir dan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sekali, dan pembayarannya dapat dilakukan secara langsung ke kantor bendahara kota(cabang) oleh wajib pajak sendiri atau disetor kepada petugas yang ditunjuk sebagai bendaharawan khusus(juru tagih) dengan menggunakan materai bangunan.

# L. Jumlah Pajak

Besarnya pajak pembangunan I adalah 10% dari jumlah bayaran dengan dibulatkan ke atas. Pada dasarnya pengusaha rumah makan dan atau penginapan harus memenuhi pajak yang telah dipungut/diterima tiap bulan dengan cara menyetor langsung kepada bendahara dalam tempo 10 hari sesudah akhir bulan di mana pajak itu terutang. Bagi wajib pajak yang atau melunasi tidak sepenuhnya melunasi pajak yang dimaksud dikenakan denda sebesar 25% dari jumlah yang seharusnya disetor. Dalam waktu satu bulan tidak menyetorkan pajak yang harus disetor dikenakan denda 100% dari jumlah yang seharusnya disetor. Pembayaran pajak dilakukan tiap-tiap akhir minggu dari suatu minggu dimana pajak itu dihitung.

#### M.Sanksi

Apabila penanggung pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Selain hukuman tersebut dapat juga berakibat ditutupnya perusahaan dan atau penyitaan barang.

Penanggung pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau catatan-catatan penerimaan. Pembukuan dan catatan-catatan penerimaan serta tanda bukti pembayaran wajib disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun . Apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut dan setelah diberi tenggang waktu selama-lamanya 3(tiga) bulan dapat dicabut izin usahanya. Penggung pajak harus memberi bantuan dan memperlihatkan pembukuan/catatan-catatan sebenarnyayan diperlukan kepada petugas yang mengadakan penelitian.

# N.Penyetoran

Untuk melakukan setoran dan sekaligus juga digunakan sebagai laporan kepada kepala dinas pajak atas perhitungan, pemungutan, dan penyetoran, wajib pajak setor tunai tiap bulan diberikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Pembangunan I dalam rangkap empat, yaitu:

- a. Lembar pertama, untuk wajib pajak.
- b. Lembar kedua dan ketiga, merupakan lembaran untuk laporan, yang setelah dibayar dan dibubuhi cap register harus dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah. Diikutsertakan juga lembaran pertama, agar dicap oleh Dinas pendapatan Daerah sebagai bukti bahwa pajak telah dibayar.
- c. Lembar keempat, pada waktu wajib pajak melakukan penyetoran di kantor bendahara kota(cabang).

d. Dalam hal wajib pajak tidak ada setoran(nihil) harus mengembalikan lembaran dua, tiga, dan empat ke Kantor Dinas Pajak sebagai laporan. Setoran dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

## O. Pembebasan

Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu, dibebaskan dari Pajak Pembangunan I. Tempattempat penginapan atau tempat pemondokan yang amat sederhana wujud sifatnya, serta rumah-rumah makan kecil yang biasanya disebut kedai, warung nasi, warung kopi, ialah yang biasanyadikunjungi oleh masyarakat yang kurang mampu. Jika ternyata bahwa rumah-rumah penginapan itu dikemudian hari tidak lagi memenuhi syarat-syarat pembebasan yang dapat diberikan, maka gubernur kepala daerah dapat mencabut pembebasan tersebut.



#### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yaitu penelitian yang terbatas pada objek tertentu pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengumpulkan data dan kemudian diolah dan dianalisis serta selanjutnya ditarik kesimpulan.

# B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kotamadya Yogyakarta

Kotamadya Yogyakarta merupakan pusat kota Yogyakarta dan banyak terdapat objek pajak pembangunan I.

2. Waktu penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan

Yaitu bulan Agustus sampai dengan Nopember 2000

# C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Yogyakarta

2. Objek penelitian

Data penelitian pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1998/1999.

# D. Metode Pengumpulan data yang digunakan meliputi:

## 1. Metode wawancara (*interview*)

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung atau dengan tatap muka untuk memperoleh informasi data-data tentang PP I antara lain mengenai gambaran umum dari pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta.

#### 2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan bahan atau data yang tertulis yang dapat dipercaya kebenarannya, tentang data pajak-pajak daerah antara lain tentang jumlah penerimaan PP I, penerimaan daerah.

# E. Data yang Dicari

- 1. Gambaran umum Kotamadya Yogyakarta
- 2. Penerimaan Pajak Pembangunan I
- 3. Penerimaan pajak daerah
- 4. Pendapatan PP I tiap tahunnya

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam analisa data adalah dengan metode analisis horizontal , yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan antara penerimaan pendapatan Pajak Pembangunan I dan penerimaan daerah.

1. Kontribusi PP I terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

Adalah seberapa besar sumbangan/andil yang diberikan dari PP I terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak.

Dimana:

Cn: Kontribusi/sumbangan PP I terhadap penerimaan daerah

RX: Penerimaan PP I

RY: Penerimaan daerah

n : Tahun (periode) tertentu

2. Tingkat pertumbuhan PP I

Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan PP I dari tahun ke tahun

$$\Delta Y = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{X 100\%}$$

$$Y_{t-1}$$

Dimana:

△ Y: Pertumbuhan PP I dari tahun ke tahun

Y<sub>t</sub>: PP I tahun t

 $Y_{t-1}$ : PP I tahun t-1

#### **BAB IV**

#### **GAMBARAN UMUM**

#### KOTA YOGYAKARTA

## A .Sejarah singkat berdirinya Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755.Pada tahun itu juga dibangun kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di bekas hutan Bering. Daerah itu berada diantara Sungai Winongo dan Sungai Code, dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Pemerintah Kotamadya Yogyakarta dibentuk tanggal 7 Juni 1947. Pada saat didirikan disebut sebagai Kota Praja. Kota Praja lahir dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 17 tahun 1947 yang membentuk Kota Yogyakarta sebagai Haminte Kota atau Kota Otonom. Undang-Undang tersebut merupakan produk perundang-undangan di jaman kemerdekaan tanggal 7 Juni 1947. Kotamadya Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan. Kota Yogyakarta lahir saat perjuangan nasional, ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden Republik Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat pertama yang menyatakan.

bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Beliau bertanggung jawab langsung atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia. 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanat yang kedua yang menyatakan, bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun Pakualaman, telah mempunyai satu DPRD Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman. Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom karena kekuasaan otonomi yang meliputi bidang Pemerintahan masih tetap di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 17 tahun 1947. Pasal I menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

# B. Geografi

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) kotamadya. Adapun keempat kabupaten itu adalah :

- a. Kabupaten Sleman
- b. Kabupaten Bantul
- c. Kabupaten Kulon Progo
- d. Kabupaten Gunung Kidul

Namun dalam tulisan ini yang menjadi daerah penelitian penulis hanyalah wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu penulis akan menguraikan sedikit tentang Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 kilometer persegi terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduknya selalu bertambah.

Tabel IV.1

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta menurut Kecamatan

Pada Akhir Tahun 1999

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Mantrijeron	38.391
2.	Kraton	31.323
3.	Mergangsan	40.553
4.	Umbulharjo	63.346

Tabel IV.1 (Lanjutan)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
5.	Kotagede	27.055
6.	Gondokusuman	71.442
7.	Danurejan	30.109
8.	Pakualaman	14.472
9.	Gondomanan	20.363
10.	Ngampilan	22.875
11.	Wirobrajan	29.484
12.	Gedongtengen	26.038
13.	Jetis	37.335
14.	Tegalrejo	37.647
Jum	lah	490.433

Sumber data: BPS Kota Yogyakarta tahun 1999

Luas wilayah yang tergolong sempit dan jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan kepadatan penduduk menjadi tinggi. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 1999 berdasarkan regristasi penduduk besarnya 15.090 jiwa per kilometer persegi. Diantara kecamatan yang kepadatan penduduknya terbesar adalah Kecamatan Ngampilan yaitu 27.896 jiwa per kilometer persegi dan yang terkecil adalah Kacamatan Umbulharjo yaitu sebesar 7.801 jiwa per kilometer persegi.Kotamadya Yogyakarta sebagai ibu kota propinsi, keadaan ini menimbulkan

tumbuhnya pemukiman yang kurang sehat, karena sulit dan mahalnya mencari lokasi tanah untuk fasilitas pemukiman.

Tabel IV.2

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Hasil Regristasi Tahun 1996 - 1999 (Jiwa/Km²)

Kecamatan	1996	1997	1998	1999
1. Mantrijeron	14.380	14.464	14.557	14.709
2. Kraton	21.887	21.984	22.304	22.374
3. Mergangsan	16.885	17.126	17.296	17.555
4. Umbulharjo	7.264	7.405	7.564	7.801
5. Kotagede	8.255	8.436	8.612	8.813
6. Gondokusuman	17.668	17.561	17.680	17.905
7. Danurejan	26.632	26.801	27.115	27.372
8. Pakualaman	22.652	22.710	22.890	22.971
9. Gondomanan	18.317	18.221	18.179	18.181
10. Ngampilan	27.178	27.479	27.652	27.896
11. Wirobrajan	16.061	16.357	16.487	16.752
12. Gedongtengen	26.724	26.831	27.008	27.123
13. Jetis	21.508	21.689	21.848	21.962
14. Tegalrejo	12.299	12.516	12.714	12.937
Kota Yogyakarta	14.599	14.731	14.885	15.090

Sumber data: BPS kota Yogyakarta tahun 1999

Peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru dapat menimbulkan gangguan pada program pembangunan yang sedang pemerintah jalankan dan dapat pula menimbulkan kesulitan bagi generasi yang akan

datang. Jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi pembangunan yang besar, tetapi juga harus disadari bahwa dengan jumlah yang besar saja bukanlah

jaminan bagi berhasilnya keberhasilan pembangunan.

# C. Batas Wilayah

Kotamadya Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas :

a. Sebelah utara : Kabupaten Dati II Sleman;

b. Sebelah timur : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman;

c. Sebelah selatan : Kabupaten Dati II Bantul;

d. Sebelah barat : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman.

## D. Kondisi Geografis

Secara garis besar Yogyakarta adalah dataran rendah yang dilintasi oleh 3 sungai :

a. Sebelah timur : Sungai Gajahwong

b. Sebelah tengah : Sungai Code

c. Sebelah barat : Sungai Winongo

Sungai-sungai ini pada musim hujan sering menimbulkan bencana banjir.

Kondisi geografis kota Yogyakarta

Tinggi dari permukaan laut : 114,00 meter

Jarak terjauh dari utara ke selatan : 7,40 Km

Jarak terjauh dari barat ke timut : 5,68 Km

Jarak dari pantai utara : 121,00 Km

Jarak dari pantai selatan : 27,00Km

Jarak dari Kota Yogyakarta ke beberapa tempat penting lainnya seperti :

1. Candi Borobudur : 40,00Km

2. Candi Prambanan : 15,00Km

3. Kaliurang : 27,00Km

4. Makam Imogiri : 18,00Km

5. Gua Selarong : 9,00Km

6. Pantai Samas : 25,00Km

7. Parangtritis : 27,00Km

8. Pantai Baron : 61,00Km

9. Kraton Solo : 68,00Km

10. Tawangmangu : 110,00Km

11. Jatijajar : 150.00Km

12. Baturaden : 200,00Km

# E. Pembagian Wilayah

Wilayah Kotamadya Yogyakarta dibagi 14 wilayah kecamatan dan 45 kelurahan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 140-263 tentang pembentukan kelurahan-kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan daerah lahan

pertanian semakin lama semakin menyempit sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah pemukiman maupun kegunaan lainnya yang juga sesuai dengan pembangunan wilayah.

Tabel IV.3

Pembagian wilayah menurut kecamatan, kelurahan dan luas

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1. Mantrijeron	1. Gedongkiwo	0,90
	2. Suryodiningratan	0,85
	3. Mantrijeron	0,86
		2,61
2. Kraton	1. Patehan	0,40
_	2. Panembahan	0,66
	3. Kadipaten	0,34
		1,40
3. Mergangsan	1. Brontokusuman	0,93
	2. Keparakan	0,53
	3. Wirogunan	0,85
4.Umbulharjo	1. Semaki	0,66
	2. Muja-muju	1,53
	3. Tahunan	0,78
	4. Warungboto	0,83
	5. Pandeyan	1,38
	6. Sorosutan	1,68
	7. Giwangan	1,26
		8,12

Tabel IV.3 (Lanjutan)

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
5. Kotagede	1. Rejowinangun	1,25
	2. Prenggan	0,99
	3. Purbayan	0,83
		3,07
6. Gondokusuman	1. Demangan	0,74
	2. Kotabaru	0,71
	3. Klitren	0,68
	4. Baciro	1,06
	5. Terban	0,80
		3,99
7.Danurejan	1. Suryatmajan	0,28
	2. Tegalpanggung	0,35
	3. Bausasran	0,47
		1,10
8. Pakualaman	1. Gunungketur	0,30
	2. Purwokinanti	0,33
		0,66
9. Gondomanan	1. Ngupasan	0,67
	2. Prawirodirjan	0,45
		1,12
10. Ngampilan	1. Notoprajan	0,37
	2. Ngampilan	0,45
		0,82
11. Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0,44
	2. Sosromenduran	0,50
		0,94

Tabel IV.3 (Lanjutan)

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
12. Wirobrajan	1. Patangpuluhan	0,44
	2. Wirobrajan	0,67
-	3.Pakuncen	0,65
		1,76
13. Jetis	1. Bumijo	0,58
	2. Gowongan	0,46
	3. Cokrodiningratan	0,66
		1.70
14. Tegalrejo	1. Kricak	0,82
	2. Karangwaru	0,70
	3. Tegalrejo	0,82
	4. Bener	0,57
		2,91

Sumber data: BPS kota Yogyakarta

# F. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air maupun kandungan mineral yang tersimpan dalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas Kota Yogyakarta telah mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut adalah:

#### 1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah kota Yogyakarta adalah jenis tanah alluvial, litosal, regosol, rensina, glomosal, meditran dan latosol. Penggunaan dan

bangunan dan lain-lain. Penguasaan tanah di kota Yogyakarta dikategorikan menjadi 2 yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang diwarisi secara turun temurun yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan. Tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah untuk kawasan hutan dan tanah untuk kepentingan umum seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain.

#### 2. Air

Kondisi sumber daya air di kota Yogyakarta meliputi air hujan, air permukaan dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan untuk keperluan lainnya. Air tanah dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, perhotelan dan industri lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

#### 3. Flora dan Fauna

Jenis-jenis tumbuhan yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang kedelai, kelapa, kapuk, dan sebagainya.

Jenis binatang meliputi jenis hewan yang diternakkan seperti sapi, kerbau, domba, ternak unggas dan binatang satwa lainnya.

#### 4. Bahan tambang

Bahan tambang yang terdapat di wilayah kota Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C yaitu seperti pasir, kerikil dan sebagainya.

#### G. Nilai-nilai budaya

Yogyakarta terkenal akan masakan khasnya, yakni gudeg. Yogyakarta juga terkenal sebagai kota revolusi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekelilingnya.

Kebudayaan tersebut adalah:

#### 1. Kesenian

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri kekhasannya, terutama tercermin pada bidang seni tari, karawitan klasik, wayang dan ketoprak. Bentuk seni tari diantaranya yaitu tari bedoyo, tari golek, tari serimpi dan lain sebagainya.

#### 2. Pakaian adat

Pakaian adat masyarakat Yogyakarta membedakan antara lain untuk kaum pria dan wanita. Pakaian adat kaum pria terdiri atas tutup kepala, baju jas dengan leher tertutup dan keris yang diselipkan di pinggang. Ia juga mengenakan pakaian batik yang mempunyai motif yang sama dengan yang dipakai pasangannya. Pakaian wanita terdiri atas kebaya dan kain batik dengan rambut yang disanggul dan diberi hiasan konde.

# 3. Senjata

Senjata tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk keris dan tombak. Selain itu juga dikenal dengan adanya tosan aji yang mana tosan berarti besi dan aji berarti dihormati karena berpetuah, sehingga tosan aji berarti senjata yang dihormati karena berpetuah.

## 4. Bangunan

Jenis bangunan tempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dalam 4 macam bentuk yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya, yaitu:

- a. Panggape yang mempunyai atap 1 (satu) sisi
- b. Kampung yang mempunyai atap 2 (dua) sisi
- c. Limasan yang mempunyai atap 4 (empat) sisi
- d. Joglo yang mempunyai atap 4 (empat) sisi seperti limasan hanya bubungannya lebih tinggi.

#### H. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di kota Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional yaitu menuju keseimbangan antara industri pertanian dengan mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor industri semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi itu adalah:

#### 1. Sektor pertanian

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang utama sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di kota Yogyakarta. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Lahan pertanian semakin lama semakin sempit karena dipergunakan untuk pemukiman penduduk.

## 2. Industri

Industri di daerah kota Yogyakarta tidak banyak, karena Yogyakarta bukan sebagai kota industri. Kota Yogyakarta memiliki beberapa perusahaan kecil, seperti : kerajinan di Kotagede, BUMD, perusahaan susu SGM dan industri kecil lainnya.

## 3. Perhubungan

Sarana perhubungan di kota Yogyakarta adalah perhubungan darat dan udara. Perhubungan udara dilayani dengan Bandar udara Adi Sucipto, Perhubungan darat kereta api dilayani melalui 2 stasiun yaitu stasiun Lempuyangan dan stasiun besar Tugu. Perhubungan darat lainnya adalah kendaraan bus dilayani di terminal Umbulharjo dan sarana kendaraan bermotor.

#### 4. Pariwisata

Kota Yogyakarta juga sebagai kota tujuan wisata. Daerah wisata di kota Yogyakarta meliputi : Kraton Yogyakarta, kawasan Malioboro, Kebun binatang Gembira Loka dan tujuan wisata lainnya.

### 5. Perdagangan

Pusat perdagangan di kota Yogyakarta berpusat di pasar Beringharjo dimana pasar ini merupakan pasar terbesar di Kota Yogyakarta, disamping pasar Beringharjo termasuk dalam kawasan Malioboro.

#### **BAB V**

#### ANALISIS DATA

## A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui kontribusi dan tingkat pertumbuhan Pajak Pembangunan I (PP I). Data utama yang diperlukan adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh Dipenda Kota Yogyakarta dari tahun 1995/1996 sampai dengan 1998/1999. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dapat diketahui besarnya kontribusi dan tingkat pertumbuhan PP I dari tahun ke tahun.

Pajak Pembangunan I adalah pungutan pajak untuk hotel dan restoran. Hotel merupakan salah satu sarana pendukung perkembangan pariwisata. Bagi Indonesia yang memiliki potensi pariwisata cukup besar, keberadaan hotel sangat penting dalam rangka meningkatkan perkembangan pariwisata, terutama Yogyakarta karena Yogyakarta juga merupakan tujuan wisata bagi turis baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan restoran merupakan faktor pendukung karena manusia membutuhkan makan sehingga restoran dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Penerimaan daerah berasal dari keseluruhan pajak daerah, seperti pajak radio, pajak bangsa asing, pajak atas pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak daerah lainnya.

Hotel dan rumah penginapan mengalami perbedaan yaitu dari segi fasilitas yang diberikan. Hotel dapat dikategorikan menjadi hotel berbintang dan hotel non bintang. Hotel memberikan fasilitas berdasarkan kategorinya, misalnya kolam renang untuk hotel berbintang. Rumah penginapan tidak mempunyai fasilitas seperti hotel berbintang. Tetapi dalam laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah , penerimaan pajak hotel dan rumah penginapan dijadikan satu. Oleh karena itu penulis kesulitan dalam memisahkan tiap sub bagian tersebut.

Tabel V.4

Jumlah hotel/ jasa akomodasi menurut kecamatan

$T_{\Delta}$	hun	1997	1	999
1 a	uuu	177/	- 1	フフフ

Kecamatan	Tahun 1997	Tahun 1998	Tahun 1999
1. Mantrijeron	27	32	32
2. Kraton	-	-	-
3. Mergangsan	53	55	53
4. Umbulharjo	23	25	26
5. Kotagede	5	5	5
6. Gondokusuman	17	17	17
7. Danurejan	22	21	21
8. Pakualaman	8	9	9
9. Gondomanan	5	6	6
10. Ngampilan	6	5	5
11. Wirobrajan	10	10	10

Tabel V.4 (Lanjutan)

Kecamatan	Tahun 1997	Tahun 1998	<b>Tahun 1999</b>
12.Gedongtengen	118	127	127
13. Jetis	9	9	9
14 Tegalrejo	6	6	6
Jumlah	309	327	326

Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

# B. Kontribusi PP I terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak pembangunan I ( PP I ) mempunyai peranan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Disebabkan karena PP I merupakan bagian dari penerimaan daerah.Pajak berperanan penting dalam penerimaan daerah karena pajak memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan daerah.

Tabel V.5

Jumlah PP I hotel dan rumah penginapan serta penerimaan daerah

Tahun Anggaran	Penerimaan Daerah	PP I dari hotel dan	
		rumah penginapan	
Tahun 1995/1996	7.584.966.013,85	3.345.914.655,75	
Tahun 1996/1997	9.807.443.463,75	3.699.977.377,50	
Tahun 1997/1998	10.329.275.602,00	4.022.348.886,00	
Tahun 1998/1999	10.265.659.324,25	3.438.800.827,00	

Sumber data: Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

1 Untuk mengetahui sumbangan/kontribusi PP I dari sektor hotel dan rumah penginapan tiap tahun digunakan rumus:

$$RXn$$

$$Cn = \underbrace{\qquad \qquad }_{Ryn} X \quad 100 \%$$

Dimana:

Cn: Kontribusi atau sumbangan PP I terhadap penerimaan daerah

RX: Penerimaan PP I dari sektor hotel dan rumah penginapan

Ry: Penerimaan Daerah

n : Tahun (periode) tertentu

Jumlah kontribusi untuk hotel dan rumah penginapan adalah:

a. Tahun anggaran 1995/1996

$$RXn$$

$$Cn = \underline{\qquad} X 100\%$$

$$Ryn$$

$$= \underline{\qquad} 3.345.914.655,75 \qquad x 100\%$$

$$7.584.966.013,85$$

$$= 44,1 \%$$

Besarnya kontribusi dari sektor hotel dan rumah penginapan untuk tahun anggaran 1995/1996 sebesar 44,1%.

b. Tahun anggaran 1996/1997

$$RXn$$

$$Cn = \frac{}{} X100 \%$$

$$Ryn$$

Besarnya kontribusi dari sektor hotel dan rumah penginapan untuk tahun anggaran 1996/1997 sebesar 37,7% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 6,4%.

# c. Tahun anggaran 1997/1998

Besarnya kontribusi dari sektor hotel dan rumah penginapan untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 38,94%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 1,24%.

# d. Tahun anggaran 1998/1999

$$RXn$$

$$Cn = ----- X100\%$$

$$Ryn$$

Besarnya kontribusi yang disumbangkan dari sektor hotel dan rumah penginapan untuk tahun anggaran 1998/1999 sebesar 33,50% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,44%.

Tabel V.6

Hasil perhitungan kontribusi PP I dari hotel dan rumah penginapan

Tahun	Penerimaan	PP I dari Hotel dan	%Kontribusi Hotel dan
Anggaran	Daerah	rumah penginapan	rumah penginapan
1995/1996	7.584.966.013,85	3.345.914.655,75	44,1
1996/1997	9.807.443.463,75	3.699.977.377,50	37,7
1997/1998	10.329.275.602,00	4.022.348.886,00	38,94
1998/1999	10.265.659.324,25	3.438.800.827,00	33,50

Tingkat kontribusi hotel dan rumah penginapan pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 41,1%. Tahun ini merupakan yang terbesar diantara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999. Tahun anggaran 1996/1997

kontribusi menurun menjadi 37,7% karena PP I nya meningkat tetapi tingkatan penerimaan daerah lebih tinggi sehingga kontribusinya tetap menurun.

Tabel V.7

Jumlah pajak pembangunan I dari sektor rumah makan

Tahun Anggaran	Penerimaan daerah	PP I dari Rumah makan
Tahun 1995/1996	7.584.966.013,58	1.261.391.612,60
Tahun 1996/1997	9.807.443.463,75	1.599.380.628,25
Tahun 1997/1998	10.329.275.602,00	1.888.901.252,00
Tahun 1998/1999	10.265.659.324,25	2.058.372.994,00

Sumber data :Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

2 Untuk mengetahui sumbangan/kontribusi PP I dari sektor rumah makan tiap tahun untuk penerimaan daerah digunakan rumus :

## Dimana:

Cn : Kontribusi atau sumbangan PP I terhadap penerimaan daerah

RX: Penerimaan PP I dari sektor rumah makan

Ry: Penerimaan daerah

n : Tahun (periode) tertentu



## Jumlah kontribusi dari sektor rumah makan adalah:

a. Tahun anggaran 1995/1996

RX n

$$Cn = \frac{1.261.391.612,60}{1.261.391.612,60}$$

$$= \frac{1.584.966.013,58}{1.584.966.013,58}$$

Besarnya kontribusi dari sektor rumah makan kepada penerimaan daerah untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah 16,6 %.

b. Tahun anggaran 1996/1997

$$1.599.380.628,25$$

$$Cn = \frac{}{} x100\%$$

$$9.807.443.463,75$$

$$= 16,3 \%$$

Besarnya kontribusi dari rumah makan untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 16,3 % menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,3 %.

# c. Tahun anggaran 1997/1998

$$Cn = \frac{1.888.901.252,00}{10.329.275.602,00}$$
$$= 18,2 \%$$

Besarnya kontribusi dari sektor rumah makan untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 18,2 % meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,9 %

# d. Tahun anggaran 1998/1999

$$2.058.372.994,00$$

$$Cn = \frac{}{10.265.659.324,25}$$

$$= 20 \%$$

Besarnya kontribusi dari sektor rumah makan untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar 20 % meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,8 %

Tabel V.8

Hasil dari perhitungan Kontribusi PP I Rumah makan

Tahun Anggaran	Penerimaan	PP I Rumah makan	% Kontribusi PP I
	Daerah		Rumah makan
1995/1996	7.584.966.013,58	1.261.391.612,60	16,6
1996/1997	9.807.443.463,75	1.599.380.628,25	16,3
1997/1998	10.329.275.602,00	1.888.901.252,00	18,2
1998/1999	10.265.659.324,25	2.058.372.994,00	20

Kontribusi PP I untuk rumah makan terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1998 adalah tahun anggaran 1997/1998 sebesar 18,2%.

# 3. Kontribusi dari sektor pajak pembangunan I sub sektor Katering

Tabel V.9

Jumlah penerimaan daerah dan katering

Tahun Angaran	Penerimaan Daerah	Katering
1995/1996	7.584.966.013,58	9.132.025,00
1996/1997	9.807.443.463,75	14.256.977,00
1997/1998	10.329.275.602,00	83.264.414,00
1998/1999	10.265.659.324,25	13.117.080,00

Sumber data: Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

Kontribusi untuk sektor katering menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Cn = \underbrace{\begin{array}{c} RX \ n \\ X \ 100\% \end{array}}_{Ryn}$$

a. Tahun anggaran 1995/1996

Besarnya kontribusi dari sektor katering untuk tahun anggaran 1995/1996 adlah sebesar 0,12 %

b. Tahun anggaran 1996/1997

$$\begin{array}{rcl}
14.256.977,00 \\
\text{Cn} &= & & & \\
& & & \\
9.807.443.463,75 \\
&= & 0.14 \%
\end{array}$$

Besarnya kontribusi dari sektor katering untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 0,14 % meningkat sangat tipis dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,02%.

c. Tahun anggaran 1997/1998

$$Cn = \frac{83.264.414,00}{10.329.275.602,00}$$
$$= 0,80 \%$$

Besarnya kontribusi dari sektor katering untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 0,80 % meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,66 %.

d. Tahun anggaran 1998/1999

$$\begin{array}{rcl}
13.117.080,00 \\
\text{Cn} &= & \underline{\qquad} & x \ 100\% \\
& & 10.265.659.324,25 \\
&= & 0,12 \%
\end{array}$$

Besarnya kontribusi dari sektor katering untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar 0,12 % menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,68 %

Tabel V.10 Hasil dari Perhitungan kontribusi PP I dari Katering

Tahun Anggaran	Penerimaan	PP I dari Katering	% Kontribusi
	Daerah		Katering
1995/1996	7.584.966.013,58	9.132.025,00	0,12
1996/1997	9.807.443.463,75	14.256.977,00	0,14
1997/1998	10.329.275.602,00	83.264.414,00	0,80
1998/1999	10.265.659.324,25	13.117.080,00	0,12

Kontribusi PP I dari katering terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 yaitu terjadi pada tahun anggaran 1997/1998.Kontribusi sangat kecil karena penerimaan untuk PP I katering juga sangat kecil.

4.Kontribusi dari sektor Pajak Pembangunan I sektor Pedagang Kaki Lima

Tabel V.11

Tahun Anggaran	Penerimaan Daerah	Pedagang Kaki lima
Tahun 1995/1996	7.584.966.013,58	43.773.915,00

Jumlah penerimaan daerah dan penerimaan dari pedagang kaki lima

Tabel V.11 (Lanjutan)

Tahun Anggaran	Penerimaan Daerah	Pedagang Kaki lima
Tahun 1996/1997	9.807.443.463,75	44.912.025,00
Tahun 1997/1998	10.329.275.602,00	39.608.225,00
Tahun 1998/1999	10.265.659.324,25	32.864.970,00

Sumber data: Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

Rumus yang digunakan untuk mencari kontribusi dari sektor pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

$$RX n$$

$$Cn = \frac{}{} X 100\%$$

$$Ryn$$

# a. Tahun anggaran 1995/1996

$$Cn = \frac{43.773.915.00}{x100\%}$$

$$7.584.966.013,58$$

$$= 0,57\%$$

Besarnya kontribusi dari sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah sebesar 0,57 %.

# b. Tahun anggaran 1996/1997

$$Cn = \frac{44.912.025,00}{9.807.443.463,75}$$
$$= 0,45\%$$

Besarnya kontribusi dari sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 0,45 % menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,12 %.

# c. Tahun anggaran 1997/1998

$$Cn = \frac{39.608.225,00}{\text{x } 100\%}$$

$$= \frac{10.329.275.602,00}{0.38\%}$$

Besarnya kontribusi sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 0,38 % menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,07 %.

# d. Tahun anggaran 1998/1999

$$32.864.970,00$$

$$Cn = \frac{}{} x 100\%$$

$$10.265.659.324,00$$

$$= 0.32 \%$$

Besarnya kontribusi dari sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar 0,32 % menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,06 %.

Tabel V. 12 Hasil dari perhitungan Kontribusi PP I Pedagang Kaki Lima

Tahun Anggaran	Penerimaan PP I Pedagang		% Kontribusi
	Daerah	Kaki Lima	Pedagang kaki lima
1995/1996	7.584.966.013,58	43.773.915,00	0,57

Tahun Anggaran	Penerimaan	PP I Pedagang	% Kontribusi	
	Daerah	Kaki Lima	Pedagang kaki lima	
1996/1997	9.807.443.463,75	44.912.025,00	0,45	
1997/1998	10.329.275.602,00	39.608.225,00	0,38	
1998/1999	10.265.659.324,25	32.864.970,00	0,32	

Kontribusi PP I dari pedagang kaki lima terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 0,57%.

# 5. Kontribusi Pajak pembangun I dari sub sektor sekaten

Tabel V.13
Penerimaan pajak daerah dan penerimaan sekaten

Tahun Anggaran	Penerimaan Daerah	Sekaten
Tahun 1995/1996	7.584.966.013,58	1.715.700,00
Tahun 1996/1997	9.807.443.463,75	1.720.741,25
Tahun 1997/1998	10.329.275.602,00	1.766.950,00
Tahun 1998/1999	10.265.659.324,25	1.679.700,00

Sumber data: Laporan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah

Rumus yang digunakan untuk mencari kontribusi dari sektor sekaten adalah sebagai berikut :

$$RX n$$

$$Cn = ----- X 100\%$$

$$Ryn$$

a. Tahun anggaran 1995/1996

$$Cn = \frac{1.715.700,00}{x \cdot 100\%}$$

$$7.584.966.013,58$$

$$= 0.02 \%$$

Besarnya kontribusi dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah sebesar 0,02 %.

b. Tahun anggaran 1996/1997

$$Cn = \frac{1.720.714,25}{9.807.443.463,75}$$

$$= 0.01$$

Besarnya kontribusi dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 0,01 % menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,01 %.

c. Tahun anggaran 1997/1998

$$Cn = \frac{1.766.950,00}{10.329.275.602,00}$$
$$= 0.01$$

Besarnya kontribusi dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 0,01 %.

# d. Tahun anggaran 1998/1999

$$Cn = \frac{1.679.700,00}{x \cdot 100\%}$$

$$= \frac{10.265.659.324,25}{0.01\%}$$

Besarnya kontribusi dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar 0,01 % tetap dari tahun sebelumnya.

Tabel V.14
Hasil dari Perhitungan Kontribusi PP I Sekaten

Tahun Anggaran	Penerimaan Daerah	PP I Sekaten	% Kontribusi
			Sekaten
1995/1996	7.584.966.013,58	1.715.700,00	0,02
1996/1997	9.807.443.463,75	1.720.741,25	0,01
1997/1998	10.329.275.602,00	1.766.950,00	0.01
1998/1999	10.265.659.324,25	1.679.700,00	0,01

Kontribusi PP I sekaten terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 adalah tahun anggaran 1995/1996 sebesar 0,02%. Sekaten terjadi hanya satu tahun sekali sehingga pendapatan pajaknya kecil.

Tabel V.15
Hasil perhitungan Kontribusi PP I ( % )

Tahun	Hotel dan	Rumah	Katering	Pedagang	Sekaten
Anggaran	Rumah	Makan		Kaki Lima	
	penginapan				
1995/1996	44,1	16,6	0,12	0,57	0,02
1996/1997	37,7	16,3	0,14	0,45	0,01
1997/1998	38,94	18,2	0,80	0,38	0,01
1998/1999	33,50	20	0,12	0,32	0,01

# C.Tingkat pertumbuhan PP I dari tahun Anggaran 1995/1996 s.d tahun anggaran 1998/1999

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PP I dari tahun ke tahun, apakah menurun atau meningkat sehingga untuk tahun depan dapat ditingkatkan lagi.

Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat pertumbuhan PP I adalah :

$$Y_{t} - Y_{t-1}$$

$$Y_{t-1}$$

$$Y_{t-1}$$

Dimana:

 $\Delta Y$ : Pertumbuhan PP I dari tahun ke tahun

Y<sub>t</sub>: PP I tahun t untuk sektor hotel dan rumah penginapan

Y<sub>t-1</sub>: PP I tahun t-1

- 1 Maka untuk mencari tingkat pertumbuhan PP I dari hotel dan rumah penginapan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. Tahun anggaran 1995/1996

Tingkat pertumbuhan PP I hotel dan rumah penginapan untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah 45,7 %, tergolong besar karena hampir mencapai 50 %.

b. Tahun anggaran 1996/1997

$$3.699.977.377,50 - 3.345.941.655,75$$

$$\Delta Y = \frac{}{3.345.941.655,75}$$

$$\Delta Y = \frac{}{10 \%}$$

Tingkat pertumbuhan PP I hotel dan rumah penginapan tahun anggaran 1996/1997 mengalami kenaikan 10 % meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 35,7 %

c. Tahun anggaran 1997/1998

$$\Delta Y = \frac{4.022.348.886,00 - 3.699.977.377,50}{3.699.977.377,50}$$
 X100 %

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor hotel dan rumah penginapan untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 8,7 %, mengalami penurunan sebesar 1,3 %.

d. Tahun anggaran 1998/1999

 $\Delta Y = 8.7 \%$ 

$$3.438.800.827,00 - 4.022.348.886,00$$

$$\Delta Y = 4.022.348.886,00$$

$$\Delta Y = -14,5 \%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor hotel dan rumah penginapan tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar –14,5 % mengalami penurunan karena pendapatan dari pajak hotel dan rumah penginapan mengalami penurunan.

2 Untuk mencari tingkat pertumbuhan PP I untuk sektor rumah makan.

Tabel V.16

Penerimaan daerah dari rumah makan, katering, pedagang kaki lima dan sekaten

Tahun	Rumah makan	Katering	Pedagang kaki	Sekaten
Anggaran			lima	
1994/1995	1.010.050.690,50	12.182.985,00	36.604.375,00	1.518.300,00
1995/1996	1.261.391.612,60	9.132.025,00	43.773.915,00	1.715.700,00
1996/1997	1.599.380.628,25	14.256,977,00	44.912.025,00	1.720.741,25
1997/1998	1.888.901.252,00	83.264.414,00	39.608.225,00	1.766.950,00
1998/1999	2.058.372.994,00	13.117.080,00	32.864.970,00	1.679.700,00

Sumber data: Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan

$$Y_{t} - Y_{t-1}$$
 $\Delta Y = \frac{1}{Y_{t-1}} \times 100 \%$ 

a. Tahun anggaran 1995/1996

$$\Delta_{Y} = \frac{1.261.391.612,60 - 1.010.050.690,50}{1.010.050.690,50} \times 100\%$$

$$= 24,88\%$$

Tingkat pertumbuhan pajak Pembangunan I dari sektor rumah makan untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah sebesar 24,88 %.

## b. Tahun anggaran 1996/1997

$$\Delta Y = \frac{1.599.380.628,25 - 1.261.391.612,60}{1.261.391.612,60}$$

$$= 26,79 \%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor rumah makan untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 26,79 % meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,91 %

## c. Tahun anggaran 1997/1998

$$\Delta Y = \frac{1.888.901.252,00 - 1.599.380.628,25}{1.599.380.628,25}$$

$$= \frac{1.599.380.628,25}{1.599.380.628,25}$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor rumah makan untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 18,1% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 8,69%.

## d. Tahun anggaran 1998/1999

$$\Delta Y = \frac{2.058.372.994,00 - 1.888.901.252,00}{1.888.901.252,00} \times 100\%$$

$$= 8,97\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor rumah makan untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar 8,97 % menurun dari tahun sebelumnya sebesar 9,13 %.

## 3. Katering

a. Tahun anggaran 1995/1996

$$\Delta Y = \frac{9.132.025,00 - 12.182.985,00}{x \cdot 100\%}$$

$$= -25\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor katering untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah sebesar –25%.

b. Tahun anggaran 1996/1997

$$\Delta Y = \frac{14.256.977,00 - 9.132.025,00}{9.132.025,00}$$

$$= 56,12\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor katering untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 56,12%

c. Tahun anggaran 1997/1998

$$\Delta^{Y} = \frac{83.264.414,00 - 14.256.977,00}{14.256.977,00} \times 100\%$$

$$= 484\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor katering untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 484%.

d. Tahun anggaran 1998/1999

$$\Delta Y = \frac{13.117.080,00 - 83.264.414}{\times 100 \%}$$

$$83.264.414$$

$$= -84,25 \%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor katering untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar -84,25 %

## 4. Pedagang Kaki Lima

a. Tahun anggaran 1995/1996

$$\Delta Y = \frac{43.773.915,00 - 36.604.375,00}{36.604.375,00} \times 100\%$$

$$= 19,5 \%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah sebesar 19,5 %.

b. Tahun anggaran 1996/1997

$$\Delta Y = \frac{44.912.025,00 - 43.773.915,00}{43.773.915,00} \times 100\%$$

$$= 2,6\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 2,6 %.

c. Tahun anggaran 1997/1998

$$\Delta Y = \frac{39.608.225,00 - 44.912.025,00}{44.912.025,00}$$

$$= \frac{44.912.025,00}{11,8\%}$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar –11,8 %.

d. Tahun anggaran 1998/1999

$$\Delta Y = \frac{32.864.970,00 - 39.608.225,00}{39.608.225,00} \times 100\%$$

$$= 17\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor pedagang kaki lima untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar 17 %.

### 5. Sekaten

a. Tahun anggaran 1995/1996

$$\Delta^{Y} = \frac{1.715.700,00 - 1.518.300,00}{x \ 100 \%}$$

$$= \frac{1.518.300,00}{x \ 100 \%}$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1995/1996 adalah sebesar 13 %.

## b. Tahun anggaran 1996/1997

$$\Delta Y = \frac{1.720.741,25 - 1.715.700,00}{x \cdot 100\%}$$

$$= 0.29\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar 0,29 % menurun dari tahun sebelumnya sebesar 12,71%.

## c. Tahun anggaran 1997/1998

$$\Delta Y = \frac{1.766.950,00 - 1.720.741,25}{1.720.741,25}$$

$$= \frac{1.720.741,25}{2,68\%}$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1997/1999 adalah sebesar 2,68 % meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,39%.

## d. Tahun anggaran 1998/1999

$$\Delta Y = \frac{1.679.700,00 - 1.766.950,00}{1.766.950,00} \times 100\%$$

$$= -4.9\%$$

Tingkat pertumbuhan PP I dari sektor sekaten untuk tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar –4,9 prosen menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel V.17
Hasil perhitungan Tingkat Pertumbuhan PP I (%)

Tahun	Hotel dan	Rumah	Katering	Pedagang	Sekaten
Anggaran	Rumah	Makan		kaki lima	
	Penginapan				
1995/1996	45,7	24,88	-25	19,5	13
1996/1997	10	26,79	56,12	2,6	0,29
1997/1998	8,7	18,1	484	-11,8	2,68
1998/1999	14	8,97	-84,25	-17	-4,9

#### D. Pembahasan

### 1. Hotel

Tingkat pertumbuhan PP I dari hotel dan rumah penginapan pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 45,7 prosen. Tingkat pertumbuhan ini terjadi karena peningkatan penerimaan pendapatan dari tahun anggaran 1994/1995 ke tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 1.049.886.812,75 ( lihat hal. 61). Tahun anggaran 1996/1997 tingkat pertumbuhan PP I dari hotel dan rumah penginapan sebesar 10 prosen, maksudnya penerimaan pendapatan dari tahun anggaran 1995/1996 ke tahun anggaran 1996/1997 naik sebesar Rp. 354.035.721,75 (lihat hal. 61). Tingkat pertumbuhan PP I hotel dan rumah penginapan untuk tahun anggaran 1997/1998 sebesar 8,7%. Jumlah penerimaan pendapatan tahun anggaran 1997/1998 sebesar 8,7%. Jumlah penerimaan pendapatan tahun anggaran

1997/1998 naik sebesar Rp. 322.371.508,50 (lihat hal. 62) dari tahun anggaran 1996/1997. Tahun anggaran 1998/1999 prosentase tingkat pertumbuhan meningkat sebesar 14% dari tahun anggaran 1997/1998. Tingkat pertumbuhan terbesar untuk PP I hotel dan rumah penginapan dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1998/1999 adalah tahun anggaran 1995/1996 sebesar 45,7%, lihat tabel V.17.

Tingkat pertumbuhan ini didukung oleh bertambahnya hotel dan rumah penginapan yang ada di Kota Yogyakarta. Tahun 1997 jumlah hotel dan rumah penginapan 309 tempat dan tahun 1998 bertambah sebesar 18 tempat menjadi 327 tempat (lihat tabel V.4).

#### 2. Rumah Makan

Tingkat pertumbuhan PP I rumah makan untuk tahun anggaran 1995/1996 sebesar 24,88 prosen. Penerimaan pendapatan tahun anggaran 1995/1996 mengalami kenaikan sebesar Rp. 251.340.922,10 (lihat tabel V.16) dari tahun anggaran 1994/1995. Penerimaan pendapatan pada tahun anggaran 1996/1997 meningkat sebesar 26,79 prosen dari tahun sebelumnya. Tahun anggaran 1997/1998 penerimaan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 18,1 prosen, meskipun secara prosentase turun tetapi penerimaan pendapatan yang diterima Dinas Pendapatan Daerah naik sebesar Rp. 289.520.623,75 (lihat tabel V.16). Tahun anggaran 1998/1999 prosentase tingkat pertumbuhan PP I rumah makan turun 8,97 prosen tetapi penerimaan pendapatan naik menjadi sebesar Rp.169.471.742,00 (lihat tabel V.16). Tingkat pertumbuhan PP I rumah makan terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu sebesar 26,79 prosen, lihat tabel V.17.

### 3. Katering

Tingkat pertumbuhan PP I katering pada tahun anggaran 1995/1996 -25 prosen disebabkan karena pendapatan tahun anggaran 1994/1995 lebih besar dari pada penerimaan pendapatan tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 3.050.960,00 (lihat tabel V.16), sehingga prosentasenya minus walaupun kontribusi PP I katering sebesar 0,12 prosen. Tahun anggaran 1996/1997 tingkat pertumbuhan PP I katering meningkat cukup besar yaitu 56,12 prosen karena penerimaan pendapatan tahun anggaran 1996/1997 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.124.952,00 (lihat tabel V.16). Tahun anggaran 1997/1998 penerimaan pendapatan meningkat sangat drastis sebesar 484 prosen .Penerimaan pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.007.437,00 (lihat tabel V.16) dari tahun anggaran1996/1997. Tahun anggaran 1998/1999 tingkat pertumbuhan PP I katering mengalami penurunan sebesar -84,25 prosen dari tahun anggaran 1997/1998. Penurunan ini disebabkan karena penerimaan pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp. 70.147.334,00 (lihat tabel V.16) walaupun kontribusinya sebesar 0,12 prosen (lihat tabel V.10) Tingkat pertumbuhan PP I katering terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 terjadi pada tahun anggaran 1997/1998 yaitu sebesar 484 prosen, lihat tabel V.17.

### 4. Pedagang Kaki Lima

Tingkat pertumbuhan PP I pedagang kaki lima pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 19,5 prosen. Penerimaan pendapatan dari pedagang kaki lima naik sebesar Rp. 7.169.540,00 dari tahun anggaran 1994/1995 ke tahun anggaran 1995/1996. Tahun anggaran 1996/1997 tingkat pertumbuhan PP I pedagang kaki lima meningkat walaupun kecil sebesar 2,6 prosen. Tahun anggaran 1997/1998 tingkat pertumbuhan mengalami -11,8 prosen karena penerimaan pendapatan untuk tahun anggaran 1997/1998 lebih kecil daripada tahun anggaran 1996/1997 yaitu Rp.5.303.800,00, walaupun kontribusi yang diberikan sebesar 0,38 prosen (lihat tabel V.11). Tahun anggaran 1998/1999 tingkat pertumbuhan juga mengalami minus karena penerimaan pendapatan tahun anggaran 1998/1999 lebih kecil daripada tahun anggaran 1997/1998 yaitu Rp. 6.743.255,00 (lihat tabel V.16) sehingga tingkat pertumbuhannya sebesar -17 prosen. Tingkat pertumbuhan PP I pedagang kaki lima tahun anggaran 1998/1999 mengalami minus walaupun kontribusinya sebesar 0,32 prosen (lihat tabel V.11) Tingkat pertumbuhan PP I pedagang kaki lima terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 19,5 prosen, lihat tabel V.17.

#### 5. Sekaten

Tingkat pertumbuhan PP I sekaten pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 13 prosen. Jumlah penerimaan pendapatan dari PP I sekaten tahun anggaran 1995/1996 naik sebesar Rp. 197.400,00 (lihat tabel V.16) dari tahun anggaran

1994/1995. Tingkat pertumbuhan PP I sekaten tahun anggaran 1996/1997 mengalami penurunan menjadi 0,29 prosen walaupun penerimaan pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.041,25 (lihat tabel V.16). Tahun anggaran 1997/1998 tingkat pertumbuhan PP I sekaten meningkat sebesar 2,68 prosen dibandingkan tahun anggaran 1996/1997. Tahun anggaran 1998/1999 tingkat pertumbuhan mengalami minus yaitu –4,9 prosen karena penerimaan pendapatan untuk tahun anggaran 1998/1999 menurun sebesar Rp. 87.250,00 (lihat tabel V.16). Tingkat pertumbuhan PP I sekaten terbesar antara tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 13 prosen, lihat tabel V.17.

Penerimaan pendapatan PP I dari sekaten jika dilihat dari kontribusi (lihat tabel V.12) dan tingkat pertumbuhannya (lihat tabel V.17) sangat kecil. Semua itu disebabkan karena sekaten hanya terjadi satu tahun sekali sehingga penerimaan pendapatannya kecil.

#### **BAB VI**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Penerimaan terbesar dari kontribusi PP I yang didapat adalah dari sektor hotel dan rumah penginapan , karena Kota Yogyakarta merupakan tujuan wisata. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 44,1 prosen dari sektor hotel dan rumah penginapan. Kontribusi terkecil pada sektor sekaten tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 1998/1999 yaitu sebesar 0,01 prosen. Hal ini disebabkan karena sekaten hanya terjadi setahun sekali sehingga pendapatannya juga sangat kecil.

Tingkat pertumbuhan Pajak Pembangunan I dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 tidak stabil, karena penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Tingkat pertumbuhan mengalami minus disebabkan karena penerimaan pendapatan pada tahun sekarang lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan PP I terbesar dari sektor katering tahun anggaran 1997/1998 sebesar 484 prosen dan terkecil juga dari sektor katering tahun anggaran 1998/1999 sebesar -84,25 prosen karena selisih pendapatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya.

### B. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil pembahasan, penulis menemukan keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagai berikut :

- Ada beberapa data yang tidak dapat dilacak kebenarannya karena data tersebut menjadi rahasia pemerintah, untuk mengantisipasi hal tersebut penulis sudah berusaha untuk mendapatkan data dengan datang langsung ke objek penelitian.
- 2. Peneliti tidak dapat melihat aktivitas kerja pemerintah karena terbatasnya waktu dan ijin penelitian.

### C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- Kota Yogyakarta adalah kota budaya. Kebudayaan jawa supaya dilestarikan, sehingga dapat mengundang turis baik asing maupun domestik. Kedatangan para turis itu dapat menambah pendapatan dari sektor hotel dan rumah makan.
- Pemerintah Kota Yogyakarta supaya menambah data-data tentang PP I khususnya jumlah rumah makan, katering, pedagang kaki lima dan klasifikasi kelas hotel untuk bintang dan non bintang.
- 3. Menghadapi otonomi daerah, pemerintah Kota Yogyakarta supaya menggali sumber-sumber keuangan yang masih diberi peluang kepada daerah, untuk menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi

kriteria yang telah ditentukan, misalnya pemungutan pajak radio dan pajakpajak lain yang berpotensi, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Yogyakarta dalam angka 1999

Mardiasmo, 1999, Perpajakan, penerbit ANDI Yogyakarta

Munawir, 1980, Pokok-pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta

- Samudra, A Azhari. 1995, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soetrisno, 1982, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, Penerbit FE UGM, Yogyakarta.
- UU Otonomi Daerah no. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Zandjani Arrachi Chairil Tubagus, 1992, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Kuisioner

- A. Gambaran umum Kotamadya Yogyakarta
  - 1. Bagaimana sejarah pembentukan Kotamadya Yogyakarta?
  - 2. Geografi
    - a. Dimana letak Kotamadya Yogyakarta?
    - b.Apa yang membatasi wilayah daerah Kotamadya Yogyakarta?
    - c.Berapa luas wilayahnya?
  - 3. Penduduk
    - a. Berapa jumlah penduduk dan apa mata pencahariannya?
    - b.Bagaimana komposisi penduduknya?
    - c. Berapa kepadatan penduduknya?
    - d.Berapa angkatan kerja/pencari kerja?
  - 4. Kekayaan alam
    - a. Bagaimana jenis tanah yang ada dan dimanfaatkan untuk apa?
    - b. Apa jenis flora dan faunanya?
  - 5. Nilai budaya
    - a. Apa kesenian yang dimiliki?
    - b.Bagaimana pakaian adatnya?
    - c. Apa senjata tradisionalnya?
    - d.Bagaimana bentuk bangunan/rumah adatnya?

### 6. Ekonomi

- a. Bagaimana sektor pertaniannya?
- b. Apa industri yang ada?
- c.Bagaimana sarana perhubungan yang ada?
- d Bagaimana tempat pariwisatanya?
- e. Apa perdagangan yang digunakan?

## 7. Pajak daerah

- a. Berapa sektor pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II?
- b.Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut?
- c. Berapa anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan?
- d.Berapa realisasi pendapatan pajak daerah yang dianggarkan?
- e. Apakah anggaran dan realisasi yang ditetapkan apakah mengalami kenaikan atau penurunan ?
- f. Apa yang menyebabkan kenaikan dan penurunan pendapatan pajak daerah tersebut ?
- g. Usaha apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pajak daerah ?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap : Fransiska Hana Martina

Tempat/tanggal lahir : Sleman, 5 Maret 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katholik

Alamat : Gamping Lor Rt 03/XI Ambarketawang, Sleman

Yogyakarta

# Riwayat Pendidikan:

TK Santi Siwi Gamping : Lulus Tahun 1982

SD Kanisius Gamping : Lulus Tahun 1989

SLTP 1 Bantul : Lulus Tahun 1992

SMU Santa Maria Yogyakarta : Lulus Tahun 1995

Universitas Sanata Dharma : Lulus Tahun 2001

